

BAB II

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak cipta dilindungi BI KKG (Institut Bisnis dan
Ekonomi Kragan)**

Terdapat tujuh sub-bab dalam bab ini, antara lain: Latar belakang masalah, yang menjelaskan mengapa topik itu penting dan apa masalahnya, yang menjadi pokok bahasan laporan penelitian ini. Proses identifikasi masalah memberikan ringkasan dan deskripsi masalah yang muncul dengan topik penelitian ini. Pertanyaan yang dipilih sesuai dengan masalah yang telah diungkapkan membentuk batasan masalah. Batasan penelitian menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penelitian membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya penulisan kritis dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan penelitian. 2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak s

Rumusan masalah menjadi inti dari penelitian ini, dengan alasan bahwa di dalam an terdapat masalah-masalah yang akan dijawab menjelang selesainya penulisan laporan ian ini. Tujuan penelitian adalah solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ootasan masalah. Manfaat dari penelitian tersebut, peneliti percaya bahwa setelah iann ini dilakukan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, khususnya para ca.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan operasionalnya, setiap perusahaan umumnya memiliki fokus utama pada pencapaian laba yang maksimal. Meskipun demikian, pendekatan semacam ini telah membuat banyak perusahaan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan operasional mereka. Sejalan dengan evolusi dunia bisnis, perusahaan kini dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya memprioritaskan laba semata. Mereka diharapkan lebih memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional mereka. Saat ini, perusahaan tidak lagi mengadopsi konsep *Single Bottom Line*, melainkan telah beralih ke konsep 3P, yaitu *Profit, People, and Planet*,



atau yang lebih dikenal sebagai *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh Elkington

(1997). Konsep ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya harus fokus pada mencapai

1. laba (*profit*), tetapi juga harus berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat sekitar (*people*) dan turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan (*planet*). Informasi terkait dengan aspek-aspek tersebut kemudian dihimpun dan dipresentasikan melalui sebuah laporan yang dikenal sebagai laporan keberlanjutan atau *sustainability report*, yang secara terpisah disusun dari laporan keuangan perusahaan.

Sustainability reporting, juga dikenal sebagai laporan keberlanjutan atau

pengungkapan keberlanjutan, mengacu pada pengungkapan informasi kinerja non-

keuangan oleh organisasi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Tujuan pelaporan

keberlanjutan adalah untuk menyampaikan kemajuan organisasi menuju tujuan pada

berbagai parameter keberlanjutan, seperti dampak lingkungan, tanggung jawab sosial, dan

praktik tata kelola serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang semakin

meningkat terkait dengan transparansi dan akuntabilitas (Prambadi, 2023). Dengan

melakukan *sustainability reporting*, organisasi dapat memberikan gambaran komprehensif

tentang bagaimana keberlanjutan menjadi bagian integral dari operasi perusahaan.

Peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian terkait topik *sustainability* dengan

berbagai metode melalui jurnal artikel yang terbit dalam jangka waktu tahun terbit 2021-

2023. Santo dan Rahayuningsih (2022) melakukan penelitian dengan topik *Corporate*

Social Responsibility Disclosure dengan judul penelitian “Karakteristik Perusahaan yang

Memengaruhi *Corporate Social Responsibility*”. Variabel yang digunakan yaitu, ukuran

perusahaan, tipe industri, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan

publik, dan pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel

ukuran perusahaan, tipe industri, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR. Sedangkan variabel ukuran dewan komisaris, kepemilikan publik, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Topik penelitian yang serupa dilakukan oleh Dewi dan Yanto (2021) dengan judul “Pengaruh Karakteristik

1. Perusahaan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. Variabel yang digunakan yaitu, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara positif signifikan dengan pengungkapan CSR. Sedangkan variabel profitabilitas, *leverage*, proporsi komisaris independen, dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Selain itu, topik *Assurance Statement* juga dibahas dalam penelitian terkait dengan *sustainability*, seperti yang dilakukan oleh Susilo dan Meiden (2023) dengan judul penelitian “*Quality Assurance Statement of Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2021*”. Penelitian tersebut menggunakan variabel kualitas *assurance statement*

di Indonesia, dan perbedaan dari kualitas *assurance statement* di Indonesia yang dibuat oleh KAP dan non-KAP. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa konten yang memiliki tingkat kepatuhan rendah. Item konten yang 100% dipatuhi oleh kedua *proxy* adalah materialitas, judul, penerima, nama penjamin, tanggal laporan, dan lokasi penjamin. Tidak terdapat perbedaan kualitas pernyataan asurans yang diterbitkan oleh penyelenggara asurans dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan non-KAP dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif karena keduanya memperoleh pernyataan asurans berkualitas tinggi. Razak et. al. (2022) melakukan penelitian topik yang serupa dengan judul “*Analisis Isi Atas Kualitas Assurance Statement pada Sustainability Report Emiten Terindeks Sri-Kehati Periode 2017-2021*”. Kualitas *Assurance Statement* diukur berdasarkan sektor usaha, perusahaan, *assurance provider*, dan standar. Hasil kualitas *assurance statement* tersebut yaitu, berdasarkan sektor usaha adalah tinggi dengan tingkat

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ketaatan sebesar 90%, berdasarkan perusahaan adalah sebesar 74%, berdasarkan *assuror* atau *assurance provider* adalah sebesar 87%, dan berdasarkan standar adalah sebesar 80%.

Selanjutnya, topik kualitas CSR dilakukan oleh Kurniawati dan Hafni (2022) dengan judul “Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor Industri Kesehatan yang *Listing* di BEI Tahun 2016-2019”. Penelitian ini menggunakan indikator GRI G4 dengan jumlah 91 indikator. Hasil dari penelitian tersebut, Perusahaan pada sektor industri kesehatan yang listing di BEI tahun 2016-2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan kualitas pelaporan CSR. Peningkatan kualitas pengungkapan CSR selama tahun 2016-2019 mencerminkan bahwa, komitmen perusahaan di industri kesehatan yang *listing* di BEI tahun 2016-2019 semakin tinggi dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Perubahan iklim dan bisnis di era *digital* di Indonesia memberikan dampak positif terhadap perkembangan investasi perusahaan-perusahaan Indonesia. Namun apabila manajemen tidak melaksanakan program perlindungan lingkungan hidup, maka semakin berkembangnya sektor industri akan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Padahal, lingkungan hidup merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu komunitas dan akan terus menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidupnya.

Khusus di Indonesia sendiri, pemerintah memberikan perhatian terhadap keberadaan perusahaan yang berorientasi ekologi melalui beberapa kebijakan dan peraturan lingkungan hidup. Diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Pasal 74 tentang Perusahaan Saham Gabungan juga menekankan tanggung jawab perusahaan untuk memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan.



Urgensi keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan lingkungan hidup juga menjadi perhatian pemerintah, berdasarkan peraturan tersebut dibuatlah

1. tanggung jawab perusahaan yang terkait dengan bidang sosial dan lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tentang Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Tahun 2012 yang mewajibkan seluruh Perseroan

Terbatas (PT) Sumber Daya Alam yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Sumber Daya

Alam (SDA) untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam

peraturan tersebut, perusahaan kewajiban untuk menerapkan hasil sosial dan lingkungan

bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan juga pemerintah sebagai salah satu

pemangku kepentingan terpentingnya. Proper merupakan salah satu inisiatif Kementerian

Lingkungan Hidup untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam mengelola lingkungan

hidup melalui intrumen informasi. Perusahaan yang menjadi sasaran PROPER adalah

perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di bursa,

mempunyai produk untuk dieksport, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati dan

mengesahkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, setelah pertemuan

Sustainable Development Summit yang dikenal sebagai di Markas PBB di New York. SDGs

ini didasarkan pada *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah diupayakan dari

tahun 2000 hingga 2015. Kemudian, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ini

menjadi tujuan global dengan rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan yang

mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Tujuan-tujuan ini terdiri dari pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola.

Tujuan utamanya adalah mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mengurangi kesenjangan,

meningkatkan pendidikan dan kesehatan, dan melindungi lingkungan (Oktaviani, 2022).



ESG (*Environmental, Social, and Corporate Governance*) dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) saling terkait dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

1. ESG adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kredibilitas mereka dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Sementara itu, SDGs adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan mengurangi ketidakpastian, pola hidup yang tidak sejahtera, dan mengatasi perbedaan kelompok. ESG dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat serta untuk mengelola risiko sosial dan tata kelola perusahaan. Dengan mengintegrasikan faktor ESG ke dalam operasinya, perusahaan dapat mendukung pencapaian SDGs dan bekerja menuju dunia yang lebih berkelanjutan dan adil (Mirekel, 2023). Dengan demikian, ESG dapat digunakan untuk mendukung pencapaian SDGs, dan keduanya saling terkait dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Penerapan ESG maupun SDGs telah dilakukan di berbagai perusahaan di Indonesia yang diungkapkan melalui *Sustainability Report*. Menurut Peraturan OJK 51/POJK.03/2017, *sustainability report* adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki isu kesenjangan sosial, yang merupakan sumber risiko yang memerlukan perhatian yang cukup. Karena itu, pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik diperlukan karena negara ini berada di bawah bahaya perubahan iklim secara geografis. Sesuai dengan POJK 51, tujuan dari peraturan penerapan keuangan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa setiap LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyadari atau berkomitmen untuk menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dan berkontribusi pada pengembangan barang dan jasa dengan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin IBIKKG.



mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan penerapan peraturan ini, diharapkan terciptanya kondisi persaingan yang sehat dan mencegah tindakan

1. yang bertentangan dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Permen LHK No. 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) untuk mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan dengan bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk mematuhi aturan lingkungan dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan. Program PROPER mulai dilakukan pada tahun 1997 yang diikuti oleh 85 perusahaan. Di tahun 2022, program PROPER telah diikuti oleh 3.200 perusahaan yang terdiri dari 1.180 agroindustri, 1.356 manufaktur prasarana jasa, dan 664 pertambangan energi migas, dimana diantaranya dari 51 perusahaan telah mendapatkan PROPER Emas pada tahun 2022. Artinya, perusahaan tersebut konsisten telah berhasil menunjukkan keunggulan dalam menjaga lingkungan pada proses produksi dan pemberian jasa, serta menerapkan prinsip bisnis yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selanjutnya, sebanyak 170 perusahaan mendapatkan peringkat Hijau, 2.031 perusahaan mendapatkan peringkat Biru, 887 perusahaan mendapatkan peringkat Merah, dan 2 perusahaan mendapatkan peringkat Hitam (Future, 2022).

Global Sustainability Standards Board (GSSB) adalah bagian penting dari struktur tata kelola *Global Reporting Initiative* (GRI). GSSB bertanggung jawab untuk menetapkan standar laporan keberlanjutan yang diakui secara global, dan bertugas mengawasi perkembangan standar GRI sesuai prosedur hukum yang didefinisikan secara formal (Global Reporting Initiative, 2023). Anggota GSSB mewakili berbagai keahlian dan perspektif berbagai pemangku kepentingan tentang pelaporan keberlanjutan, dan mereka melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan proses hukum yang didefinisikan secara formal, secara eksklusif untuk kepentingan publik. Dengan demikian, GRI membantu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



organisasi untuk memahami dan mengelola dampak eksternalitas mereka secara lebih efektif serta membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan melalui pelaporan yang transparan (Global Reporting Initiative, 2023). Selain GRI Standar, CDP membantu

organisasi mengelola dampak lingkungan mereka dengan menyediakan sistem pengkualifikasi pemanasan lingkungan yang diakui global. *Carbon Disclosure Project*

(CDP) adalah sebuah organisasi berafiliasi yang mengelola sistem pengkualifikasi pemanasan lingkungan untuk investor, perusahaan, kota, negara, dan region (Carbon Disclosure Project, 2023). Pada tahun 2021, lebih dari 13.000 perusahaan di seluruh dunia melaporkan data melalui CDP, setara dengan lebih dari setengah kapitalisasi pasar global.

Di Indonesia, dari 222 perusahaan Indonesia yang diminta untuk melaporkan, 76 di antaranya melaporkan tindakannya melalui CDP; dari jumlah perusahaan ini, sebanyak 74 melaporkan tindakannya terkait energi dan emisi menggunakan kuesioner perubahan iklim.

Meskipun jumlah perusahaan yang melaporkan data melalui kuesioner ini relatif rendah, Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan masalah lingkungan telah meningkat di dalam dan di seluruh kegiatan perusahaan (Arifiandi & Putri, 2022).

Bentuk *corporate social responsibility* (CSR) emiten akhir-akhir ini yaitu membuat program strategis atau inovasi yang bermanfaat dalam aspek sosial dan lingkungan.

Program CSR yang strategis harus sesuai, melengkapi dan bersinergi dengan kompetensi inti perusahaan, sehingga strategi ini dapat mengupayakan nilai-nilai sosial (Krlev, 2012).

Perusahaan tersebut tidak hanya fokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif sosial yang memberikan manfaat positif kepada masyarakat tempat mereka beroperasi. Hal ini diwujudkan oleh PT PLN Indonesia Power dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungannya di wilayah warakas. Program strategis yang dilakukan PT PLN Indonesia Power dikenal dengan nama Ketapang Kuning (Future, 2022). Program ini dibuat untuk mengurangi penurunan jumlah stunting melalui

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

budidaya ikan, warung opini dan bank sampah. Pemanfaatan sampah organik rumah tangga yang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan *pellet*, sehingga dapat mengurangi

1. **Hasil Penelitian**
pencemaran udara serta sampah plastik yang digunakan sebagai voucher hewani. Program strategis tersebut menjadi pintu bagi penelitian yang akan dilakukan dengan mengangkat judul “Analisis Implementasi *Environment, Social, and Governance* Terintegrasi: Studi Kasus Pada PT PLN Indonesia Power Memperoleh PROPER Emas Tahun 2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

identifikasi masalah penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian materialitas perusahaan?
2. Bagaimana kualitas pengungkapan emisi karbon laporan keberlanjutan perusahaan?
3. Bagaimana tata kelola perusahaan dan *Social Return on Investment*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membantu membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi:

1. Bagaimana *materiality* didefinisikan perusahaan?

2. Bagaimana kualitas pengungkapan emisi karbon laporan keberlanjutan perusahaan?

3. Bagaimana tata kelola Perusahaan dan *Social Return on Investment*?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Aspek Objek

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meminta izin dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Penelitian ini dilakukan pada PT PLN Indonesia Power. Alasan pemilihan ini adalah untuk menggambarkan program strategi perusahaan sehingga mendapatkan penghargaan PROPER Emas.

2. Berdasarkan Aspek Waktu

Penelitian ini dilakukan atas Laporan keberlanjutan yang dipublikasikan untuk periode tahun 2022.

3. Berdasarkan Aspek Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan sustainability Report pada PT PLN Indonesia Power.

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana penilaian materialitas, kualitas pengungkapan emisi karbon, dan tata kelola perusahaan dan *Social Return on Investment* dalam implementasi ESG pada PT PLN Indonesia Power sehingga mendapatkan penghargaan PROPER EMAS.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penilaian materialitas perusahaan.

2. Untuk mengetahui kualitas pengungkapan emisi karbon laporan keberlanjutan perusahaan.

3. Untuk mengetahui tata kelola perusahaan dan *Social Return on Investment*.

C. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

G. Manfaat Penelitian

C Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi manajemen

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi manajemen perusahaan dalam mengungkapkan penilaian materialitas, pengungkapan emisi karbon, tata kelola perusahaan, dan *Social Return on Investment* saat penyusunan *sustainability report*.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru dalam penerapan metode berinvestasi untuk memilih perusahaan yang sudah mengimplementasikan prinsip ESG pada penyusunan Pelaporan keberlanjutan membebaskan calon investor dari terjebak tidak hanya pada analisis laporan keuangan yang sudah banyak digunakan oleh berbagai platform sekuritas, namun juga pada analisis non-keuangan yang masih jarang dibahas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi ESG sehingga memperoleh penghargaan PROPER Emas dan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.